

KEMAMPUAN POLITIK LOKAL DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS PADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG)

INTISARI

Salah satu institusi yang menempati posisi strategis dalam politik lokal adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, institusi ini diharapkan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah mempunyai kemampuan yang optimal, minimal untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), apabila dikaitkan dengan konteks konstitusionalisme sebenarnya merupakan lembaga yang dapat menjamin tegaknya pemerintahan yang demokratis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana kemampuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang dalam melaksanakan fungsi-fungsinya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi penganggaran dalam kapasitasnya sebagai institusi politik lokal.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif eksploratif dan teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk memperoleh data yang valid digunakan metode triangulasi dengan cara melakukan pengecekan silang (*cross check*) terhadap data/temuan yang diperoleh.

Dari hasil temuan dan analisis diketahui keberadaan institusi-institusi politik lokal mengarahkan pada persoalan bahwa masing-masing dan atau secara bersama-sama, institusi-institusi politik lokal nampak belum sepenuhnya mampu mendukung tuntutan-tuntutan baru dari Otonomi Daerah, dan karena itu, belum juga secara optimal kontributif untuk pengembangan kemampuan politik lokal. Mekanisme kerjasama yang mestinya mengkaitkan antara satu institusi dengan institusi politik lainnya dalam kerangka kerja suatu sistem politik belum nampak tersedia. Dengan kata lain, dalam kondisi institusi-institusi politik yang lemah, dan interaksi antara mereka yang kurang memadai seperti ini, mengindikasikan bahwa sistem politik lokal itu sendiri masih belum sempurna. Hal ini salah satunya dikarenakan keahlian atau skill aktor-aktor politik lokal belum memadai untuk memfungsikan sistem itu. Ini mungkin saja disebabkan oleh mekanisme rekrutmen politik yang tidak berfungsi dengan baik, atau karena memang tidak tersedia aktor-aktor politik lokal yang mempunyai kualifikasi memadai untuk peran dan fungsi seperti itu. Keadaan ini dapat berakibat pada tidak terkelolanya aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal, dan lebih jauh, terabaikannya aspirasi dan kepentingan itu oleh politik lokal.

Saran yang dapat dikemukakan antara lain : partai politik hendaknya mempersiapkan kadernya dengan lebih matang, perlu ada peraturan yang memungkinkan partai politik atau elemen masyarakat dapat melakukan kontrol terhadap perilaku anggota DPRD, adanya tenaga ahli, adanya standard penilaian yang jelas serta perlunya dibuka seluas mungkin inisiatif lokal untuk memikirkan dan mengembangkan pelebagaan politik yang secara langsung melibatkan partisipasi masyarakat.

LOCAL POLITICAL CAPABILITY IN IMPLEMENTING REGIONAL AUTONOMY (CASE STUDY IN REGIONAL PARLIAMENT OF BONTANG MUNICIPALITY)

ABSTRACT

One of institutions that has strategic position in local politics is Regional Parliament. Therefore, the institution is expected has an optimal capability in implementing the regional autonomy, at least in performing its functions. The functions of the institution can ensure the democratic government if it is connected with the constitutional context.

The research aims to find out how far the capability of the Regional Parliament implements the its functions, i.e., legislative function, control function, and budget function in its capacity as local political institution.

Method used in this research is qualitative method with explorative descriptive approach and analysis technique used is analysis of qualitative data. Technique of data collecting was accomplished through interview, documentation and observation. To obtain the valid data is used the method of triangulation through a way of cross-check on the obtained data.

According to the result of the analysis has been found out that existence of local political institution is focused on some cases that either partially or collectively, the local political institutions, apparently, have not yet completely support the new demands of the autonomy. Thereby, they have not yet optimally contributed the improvement of local political capability. Cooperative mechanism that should connect between one institution and the others in framework of a political system does not apparently exist. In the other word, in a weak condition of the political institutions and a inadequate interaction of each others indicate that the local political system is not yet complete. One of causes is the political actors' inadequate skill to apply the system. It is caused by the defective political recruitment mechanism, or there are not any local political actors who has good qualification for the function and the position. This condition can make the public aspiration and wish unsatisfied, and furthermore it can make public aspiration neglected by the local politics.

Following suggestions proposed are as follows : political parties should prepare its cadre more completely, it needs regulations that enable the political parties or the societal elements to control its member behavior, there are experts and obvious assessing standard as well as need to open the local initiative as large as possible in order to consider and develop the political institutionalization that directly involves the societal participation.